

IRIGASI

2021

PERBUP NO. 52, BD. 2021. NO. 52 KAB. PEMALANG : 47 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dalam rangka upaya mewujudkan tertib dalam pengelolaan jaringan irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan efektifitas, efisiensi, produktifitas dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi perlu dilakukan pembaharuan pengaturan wewenang tugas dan tanggungjawab kelembagaan pengelola irigasi di Kabupaten Pemalang. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat 13 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pgelolaan Sistem Irigasi, maka perlu diatur tentang lembaga pengelolaan irigasi di Kabupaten Pemalang.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 20 Tahun 2006; Intruksi Presiden No. 2 Tahun 1984; PermenPUPR No. 33/PRT/M/2007; PermenPUPR No. 12/PRT/M/2015; PermenPUPR No. 17/PRT/M/2015; PermenPUPR No. 23/PRT/M/2015/ PermenPUPR No. 30/PRT/M/2015; Pergub No. 9 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 17 Tahun 2017
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lembaga Pengelola Irigasi Di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lembaga pengelola irigasi terdiri atas : 1. Perangkat Daerah; 2. Komisi Irigasi; 3. P3A Dharma Tirta. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 1. Lembaga Pengelola Irigasi; 2. Perangkat Daerah; 3. Komisi Irigasi; 4. Perkumpulan Petani Pemakai Air; 5. PPA/Ulu-ulu Vak; 6. Pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A Dharma Tirta; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 Desember 2021
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sistem Irigasi (berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri atas 77 Pasal
  - Terdiri atas 9 Lampiran